

Peningkatan Pemahaman Tentang Hak Dan Kewajiban Partisipasi Pemilu Dan Konteks Bahaya Money Politic

Dafi' Al Khayyan, Fery Dwi Pangestu, Kahla Nazsha Alhayyu, Muh. Amirul Mubarak Ma'ruf, Muhammad Kaznasani, Putri Devya Permata Sari, Wiwit Kharisma Putri, Tri Wulandari Kesetyaningsih*

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183

Email: trikasetyaningsih@umy.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.18196/ppm.62.1225>

Abstrak

Partisipasi aktif masyarakat, khususnya pemilih, dalam pemilihan umum (PEMILU) dianggap sebagai pilar utama bagi keberlanjutan demokrasi yang kokoh. Untuk mengatasi tantangan pemahaman masyarakat terkait pemilihan umum, dilakukan pendekatan sosialisasi politik guna meningkatkan kesadaran akan proses demokrasi. Kegiatan ini fokus pada peningkatan pemahaman hak dan kewajiban pemilih pemula di dusun Maesan Wetan dalam berpartisipasi dalam pemilu, dengan mempertimbangkan risiko money politik yang umumnya terjadi dalam proses pemilu. Dalam kegiatan sosialisasi, dilakukan penyuluhan komprehensif mengenai money politik, mencakup jenis-jenis, sumber-sumber, dan dampak negatifnya pada sistem politik. Sosialisasi melibatkan seminar terkait money politic, bertujuan mendekatkan masyarakat pada nilai-nilai demokrasi serta hak dan kewajiban mereka dalam pemilihan umum. Metode intervensi pendidikan publik diimplementasikan dalam sosialisasi ini, melibatkan pemilih pemula dalam serangkaian langkah. Kegiatan ini melibatkan diskusi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sasaran tentang hak dan kewajiban mereka dalam pemilu, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bahaya money politik. Hasilnya menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman masyarakat sasaran tentang hak dan kewajiban mereka dalam berpartisipasi dalam pemilu. Mereka menjadi lebih mampu mengidentifikasi praktik money politik dan memahami dampak negatifnya terhadap sistem politik. Implikasi dari kegiatan ini adalah, dengan pemahaman yang lebih baik, pemilih pemula dapat berpartisipasi dalam pemilu dengan lebih efektif, sehingga mampu melindungi integritas demokrasi.

Kata Kunci: penyuluhan, pemilu, partisipasi masyarakat, dusun plosa

Pendahuluan

Pemilu, sebagai salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi, memerlukan partisipasi aktif warga negara untuk memilih wakil mereka. Partisipasi ini bukan hanya hak dasar, tetapi juga kewajiban yang mendasar bagi setiap warga negara dalam mendukung sistem demokrasi yang efektif. Namun, kekhawatiran semakin meningkat terkait dampak negatif praktik money politic dalam proses pemilu, di mana uang menjadi faktor penentu yang kuat dalam menentukan hasil pemilihan. Bumke (2014) menyatakan bahwa selama ini memang tidak ada definisi baku tentang politik uang. Politik uang adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (Jurdi, F 2018). Di dalam konteks ekonomi, praktek politik uang menyuburkan tindakan korupsi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. (Beguovic, 2021).

Money politic melibatkan pendanaan kampanye tanpa batas, praktik lobbying intensif, dan keterlibatan finansial korporasi yang signifikan dalam pemilihan umum. Dampaknya mengubah dinamika partisipasi dalam pemilu dari yang semula didorong oleh keyakinan politik dan kesadaran akan hak serta kewajiban sebagai warga negara, menjadi dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan finansial. Hal ini menimbulkan tantangan serius bagi demokrasi, menjadikan pemilihan semakin bersifat kompetisi finansial daripada pilihan berdasarkan nilai-nilai dan ideologi.

Ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya finansial dan pengaruh politik yang dihasilkan oleh money politic merusak prinsip dasar demokrasi yang adil dan setara, di mana setiap suara seharusnya memiliki bobot yang sama. Warga negara dengan sumber daya finansial yang lebih besar dapat lebih mudah memengaruhi pemilihan umum dan mendapatkan akses yang lebih besar ke para pemimpin politik, sementara warga negara dengan sumber daya yang terbatas dapat merasa terpinggirkan dan kehilangan motivasi untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Dalam konteks ini, sosialisasi politik dan literasi politik menjadi kunci untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses politik dan pemilihan umum. Sosialisasi politik mencakup pengenalan nilai-nilai politik, institusi politik, dan peran warga negara dalam sistem politik. Di sisi lain, literasi politik melibatkan kemampuan individu untuk menganalisis informasi politik, memahami isu-isu politik, dan membuat keputusan politik yang berdasarkan pengetahuan yang kuat. Semakin kita rajin membaca, maka dapat dipastikan kita akan semakin banyak tahu dan banyak bisa (Azmi Rizky Anisa, 2021). Literasi politik mencakup kemampuan individu untuk menganalisis informasi politik, memahami isu-isu politik, serta membuat keputusan politik yang berdasarkan pengetahuan dan pemahaman yang kuat (Poguntke, T, 2016).

Fransiska Adelina (2019) menjelaskan bahwa salah satu penyebab atau potensi dari praktik korupsi politik ialah politik uang yang digunakan untuk praktik jual beli suara pemilih. Robin Hodess (2004) mendefinisikan korupsi politik sebagai penyelewengan kekuasaan yang dilakukan politisi (Political leaders or elected officials) untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan tujuan meningkatkan kekuasaan atau kekayaan. Untuk mengatasi tantangan moneypolitic dan meningkatkan partisipasi yang sehat dalam pemilu, diperlukan upaya nyata untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya praktik ini, serta mempromosikan sosialisasi politik dan literasi politik yang lebih baik. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban dalam berpartisipasi dalam PEMILU, diharapkan warga negara dapat menjadi agen perubahan dalam menjaga integritas demokrasi dan mendorong partisipasi yang lebih bermakna dalam pemilihan umum.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini memiliki fokus yang sangat penting, yaitu pemahaman masyarakat terkait hak dan kewajiban dalam berpartisipasi dalam Pemilihan Umum (PEMILU) dengan mempertimbangkan konteks bahaya money politic. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami mengadopsi pendekatan sosialisasi yang dimana terdapat diskusi, tanya jawab, pengikraran penolakan money politic. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menghasilkan pemahaman yang lebih holistik dan mendalam mengenai isu-isu yang diteliti. Sosialisasi adalah metode yang kami gunakan untuk mendalami perspektif individu terkait dengan pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban dalam berpartisipasi dalam PEMILU. Kami percaya bahwa melalui sosialisasi, kami dapat menggali gagasan, nilai-nilai, dan pengalaman yang mendasari pandangan individu terhadap proses politik. Ini adalah komponen penting dalam mengungkapkan aspek-aspek subtan pemahaman masyarakat yang mungkin tidak dapat diukur dengan metode kuantitatif. Wawancara ini dilakukan di daerah Maesan Wetan, Lendah, Kulonprogo, yang mencakup beragam lapisan masyarakat.

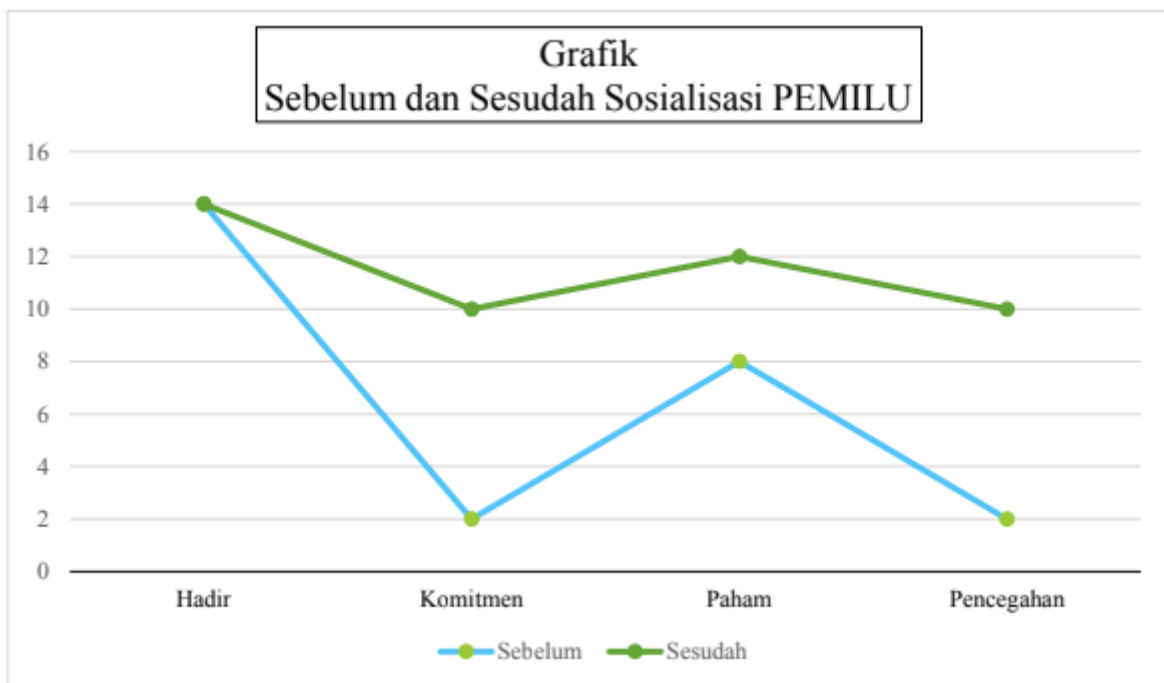
Pengumpulan data survei kuantitatif dilakukan secara acak dengan metode tanya jawab/wawancara terstruktur. Kami berusaha untuk mendapatkan data dari sebanyak mungkin pemilih pemula di wilayah Maesan Wetan, Wahyuharjo. Namun, selama proses pengumpulan data, kami hanya berhasil mengumpulkan data dari 33 responden yang merupakan anggota dari karang taruna Maesan Wetan. Selain survei kuantitatif, kami juga melakukan sosialisasi Pemilu dengan beberapa Masyarakat sasaran yang memiliki pengalaman baru dan pemahaman yang cukup tentang politik dan PEMILU. Sosialisasi ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang latar belakang, sikap, dan persepsi individu terkait dengan hak dan kewajiban dalam berpartisipasi dalam PEMILU serta cara mereka menghadapi bahaya money politic. Interaksi langsung ini memberi kami wawasan yang berharga yang akan kami sertakan dalam analisis kami.

Hasil kegiatan ini akan disajikan dalam paper kami dengan menyoroti beberapa hal seperti temuan utama, implikasi praktis, dan rekomendasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam berpartisipasi dalam PEMILU, tidak luput juga dengan sambil meminimalisir akan risiko bahaya money politic. Dengan harapan bahwa hasil

penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam memperkuat partisipasi demokratis dan mengurangi kerentanan terhadap pengaruh negatif dalam proses politik.

Hasil dan Pembahasan

Pentingnya partisipasi aktif warga negara dalam pemilihan umum sebagai salah satu pilar demokrasi semakin terangkat, namun, munculnya praktik moneypolitic, di mana uang menjadi faktor penentu dalam hasil pemilihan, telah membawa dampak negatif. Praktik ini merubah dinamika partisipasi, tidak hanya didorong oleh keyakinan politik atau kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan finansial. Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan moneypolitic dan meningkatkan partisipasi yang sehat, perlu dilakukan upaya nyata dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya praktik ini, sekaligus mempromosikan sosialisasi politik dan literasi politik yang lebih baik. Dengan demikian, diharapkan warga negara dapat menjadi agen perubahan untuk menjaga integritas demokrasi dan meningkatkan partisipasi yang lebih bermakna dalam pemilihan umum.



Gambar 1. Grafik pemahaman pemilu peserta sosialisasi

Data yang disajikan memberikan informasi mengenai partisipasi peserta sosialisasi sebelum dan setelah acara tersebut, yang kemungkinan terkait dengan pemahaman dan pencegahan terhadap suatu isu atau topik tertentu. Tujuan sosialisasi adalah meningkatkan komitmen peserta terhadap masalah tersebut, memperdalam pemahaman mereka, dan mendorong langkah-langkah pencegahan yang lebih baik. Berdasarkan data, peserta sosialisasi berjumlah 14 orang. Sebelum acara, hanya 2 peserta yang menunjukkan komitmen terhadap isu tersebut. Namun, setelah sosialisasi, terjadi peningkatan yang signifikan, di mana 10 peserta menunjukkan tingkat komitmen yang lebih tinggi. Hal ini menandakan keberhasilan sosialisasi dalam meningkatkan komitmen peserta terhadap isu yang dibahas. Sebelum sosialisasi, 10 peserta sudah memiliki pemahaman tentang isu tersebut. Setelah acara, terjadi peningkatan pemahaman, dengan 12 peserta menunjukkan pemahaman yang lebih dalam. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa sosialisasi efektif dalam memperdalam pemahaman peserta terhadap isu yang dibahas.

Dengan merinci data tersebut, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi berhasil mencapai tujuannya. Terdapat peningkatan signifikan dalam tingkat komitmen, pemahaman, dan tindakan pencegahan peserta setelah sosialisasi. Ini menegaskan bahwa sosialisasi merupakan alat yang efektif untuk mengubah sikap dan tindakan peserta terhadap isu atau topik tertentu. Keberhasilan ini dapat menjadi panduan berharga untuk melanjutkan atau meningkatkan upaya sosialisasi di masa mendatang.

Pemilihan umum menjadi salah satu momen krusial bagi masyarakat Indonesia, mengingat bahwa pemilu merupakan suatu proses keterlibatan warga negara dalam pengelolaan pemerintahan. Warga negara turut serta aktif dalam menentukan siapa yang akan mengendalikan pemerintahan dalam periode tertentu (Pahlevi, 2019). Partisipasi warga dalam pemilihan umum memenuhi prinsip-prinsip penting dalam menjalankan pemerintahan, seperti transparansi, di mana pemerintah memberikan akses kepada warganya untuk memilih pemimpin dan menentukan siapa yang akan memimpin pemerintahan dengan visi misi idealisnya.

Sebelum menjadi calon pemimpin, visi misi calon menjadi penting sebagai bagian dari citra branding, menunjukkan bagaimana calon akan membawa masyarakat dan daerahnya menuju kesejahteraan dan kemakmuran. Proses penguatan citra branding ini seringkali dilakukan satu tahun sebelum pemilihan umum hingga beberapa bulan sebelumnya, yang dikenal sebagai "tahun politik." Tahun politik menjadi ajang persaingan untuk membangun kepercayaan rakyat, membentuk citra di mata rakyat, dan menunjukkan dedikasi calon pemimpin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sayangnya, tahun politik juga seringkali diwarnai oleh praktik politik uang atau money politic, di mana suara rakyat menjadi taruhan dalam proses transaksional. Politik uang tidak hanya terbatas pada pemberian uang langsung kepada masyarakat, tetapi juga melibatkan pembangunan citra calon dengan mengatasnamakan kepentingan bersama, padahal diisi oleh harta pribadi. Ketidaksetaraan dalam relasi kuasa antara calon pemerintah dan rakyat menjadi sumber ketidakberdayaan rakyat, di mana suara mereka dianggap telah "dibeli" dan kehilangan nilai di masa depan.

Studi dari Latin American Public Opinion Project (LAPOP) Americas Barometer, Afrobarometer, dan Money Politics Project di Asia Tenggara menempatkan Indonesia sebagai peringkat ketiga negara dengan praktik jual beli suara atau politik uang terbanyak di dunia, hanya kalah dari Uganda dan Benin. Praktik politik uang ini bukan hanya menimbulkan masalah selama kampanye, tetapi juga berdampak pada kepemimpinan yang terpilih, sering kali melibatkan tindakan merugikan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Melihat permasalahan ini, kami memandang perlu untuk melakukan sosialisasi pemilu, dengan tujuan memberikan pemahaman kepada pemilih mengenai bahaya politik uang atau money politic. Pemateri akan menyajikan pemahaman mengenai dampak mikro dan makro dari politik uang. Survei dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukkan bahwa 40% masyarakat Indonesia menerima uang dari peserta pemilu 2019, dan 37% di antaranya mempertimbangkan untuk tetap memilih mereka (Purnamasari, 2019). Di Daerah Istimewa Yogyakarta, survei oleh Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) menunjukkan bahwa 42% masyarakat menganggap politik uang sebagai hal yang wajar, sementara 30% menganggapnya prihatin, dan 28% menganggapnya sebagai masalah besar (Komite Independen Sadar Pemilu, 2019).

Upaya pencegahan praktik politik uang ini menjadi penting untuk memposisikan masyarakat sebagai good citizen, serta menjadikan mereka sebagai pengawas roda pemerintahan. Gerakan Desa Anti-Politik Uang (APU) di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu inisiatif yang mendorong masyarakat untuk melawan praktik politik uang. APU bertujuan melakukan pendidikan politik pre-emptive dengan melibatkan LSM kepemiluan, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, tokoh masyarakat desa, dan stakeholder lainnya. Masyarakat diharapkan menyadari bahwa praktik politik uang merugikan mereka dalam jangka panjang dan mampu melakukan perlawanan untuk

menjaga demokrasi. Tercatat ada 34 Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta mendeklarasikan diri sebagai Desa Anti-Politik Uang (APU) sebagaimana dalam Tabel 1.

Tabel 1. Desa Anti Politik Uang DIY

No	Kabupaten	Desa
1	Bantul	Panggunharjo, Sriharjo, Sitimulyo, Tirtohargo, Pleret, Wirokerten, Temuwuh, Murtigading
2	Sleman	Candibinangun, Sardonoarjo
3	Gunung Kidul	Nglangeran, Dengok, Wunung, Candirejo, Hargomulyo, Tancep, Pilangrejo, Bendungan, Rejosari, Tepus, Ngestirejo, Karangwuni, Jerukwudel, Karangduwet, Sawahan, Ngloro, Giriwungi, dan Giriasih
4	Kulon Progo	Temon Kulon, Wahyuharjo, Banyuroto, Karang Sari, Purwosari
5	Kota Yogyakarta	Kecamatan Keraton

Gerakan dan deklarasi ini bertujuan untuk membentuk aktor desa menjadi tim yang memberikan pendidikan politik positif bagi masyarakat, khususnya berkaitan dengan jual-beli suara atau praktik politik uang. Dari sejumlah desa yang melakukan deklarasi politik uang, tidak semua desa mampu maksimal dan konsisten untuk melakukan kerja-kerja pendidikan politik terus menerus. Dua Desa percontohan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang menjadi barometer keberhasilan Desa APU yaitu Desa Sardonoarjo dan Desa Murtigading. Kedua desa tersebut mencontohkan pola sikap moral dalam menjaga kualitas demokrasi agar tidak ternodai. Memberikan semangat kepada para pemilih bahwa suara masyarakat dalam pemilu itu bernilai.



Gambar 1. Kegiatan sosialisasi

Program kerja sosialisasi yang kami selenggarakan diharapkan mampu menjadi salah satu langkah kecil untuk membuat gerakan desa anti politik uang, ini bagian dari memberikan pendidikan politik melalui upaya preemtif kepada masyarakat desa. Tujuannya untuk menumbuhkan keterampilan pemahaman politik di masyarakat. Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, LSM, dan masyarakat tokoh memberikan pendidikan politik dan pemahaman kepada masyarakat bahwa praktik politik uang merupakan salah satu penyebab rusaknya demokrasi di Indonesia dan akan menciptakan korupsi politik. Selain itu, gerakan ini terus dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi politik disetiap perkumpulan warga, serta memasang stiker dan spanduk. Selanjutnya dilakukan juga upaya pencegahan dengan membuka pengaduan posko apabila mendapati suatu praktik politik uang. Sosialisasi pemilu, yang merupakan upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang proses pemilihan

umum dan hak-hak serta tanggung jawab mereka dalam demokrasi, memiliki berbagai manfaat penting. Berikut beberapa manfaat dari sosialisasi pemilu:

- a. Peningkatan Partisipasi Demokratis: Sosialisasi pemilu membantu meningkatkan partisipasi aktif warga negara dalam proses pemilihan umum. Ketika masyarakat lebih memahami bagaimana sistem pemilu berfungsi dan mengapa partisipasi mereka penting, mereka lebih cenderung untuk memberikan suara dan berpartisipasi dalam proses demokratis.
- b. Kesadaran Hak-Hak Pemilih: Sosialisasi pemilu membantu warga negara memahami hak-hak mereka sebagai pemilih, seperti hak memberikan suara, hak memilih calon, dan hak untuk terlibat dalam proses politik. Hal ini memungkinkan mereka untuk menggunakan hak-hak ini dengan tepat.
- c. Pemahaman tentang Calon dan Isu-Isu: Sosialisasi pemilu membantu warga negara untuk memahami lebih baik tentang calon-calon yang berpartisipasi dalam pemilihan dan isu-isu yang mereka ajukan. Dengan pengetahuan ini, pemilih dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi saat memberikan suara.
- d. Pencegahan Penipuan Pemilu: Edukasi pemilu juga dapat membantu masyarakat mengidentifikasi dan melaporkan upaya penipuan pemilu, seperti tindakan penyebaran informasi palsu atau manipulasi pemilu. Ini dapat meningkatkan integritas pemilihan.
- e. Mengurangi Ketidakpuasan Politik: Ketika pemilih merasa terlibat dalam proses politik dan merasa bahwa suara mereka dihargai, mereka cenderung lebih puas dengan sistem politik. Sosialisasi pemilu dapat membantu mengurangi ketidakpuasan politik dan meningkatkan legitimasi pemerintah yang terpilih.
- f. Keterlibatan Masyarakat: Sosialisasi pemilu dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan politik dan sosial lainnya. Ketika masyarakat terlibat dalam pemilu, mereka juga mungkin lebih cenderung terlibat dalam masalah-masalah sosial dan kebijakan.
- g. Mendorong Diskusi dan Dialog: Sosialisasi pemilu mendorong diskusi dan dialog yang sehat tentang isu-isu politik di masyarakat. Hal ini dapat membantu memperkuat demokrasi dengan memungkinkan berbagai pandangan dan ide untuk dipertimbangkan.
- h. Pemahaman Lebih Baik tentang Proses Demokrasi: Sosialisasi pemilu membantu masyarakat memahami lebih baik tentang bagaimana demokrasi bekerja, termasuk konsep dasar seperti pemisahan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, dan pentingnya pemerintahan yang akuntabel.
- i. Peningkatan Transparansi: Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang proses pemilu, ada tekanan yang lebih besar pada pemerintah dan lembaga pemilihan untuk menjalankan pemilihan secara transparan dan adil. Sosialisasi pemilu memiliki peran penting dalam memperkuat demokrasi dan memastikan bahwa pemilihan umum berjalan dengan baik.

Dengan meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemilu, masyarakat dapat berkontribusi secara positif terhadap proses politik dan pembangunan negara. Adapun Peran pentingnya sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan Masyarakat: Sosialisasi ini memberikan pengetahuan kepada warga desa tentang money politik, yang memungkinkan mereka untuk membuat keputusan politik yang lebih cerdas dan independen.
- b. Mencegah Praktik Korupsi : Dengan memahami bahaya money politik, masyarakat desa dapat lebih waspada terhadap tindakan korupsi yang mungkin terjadi dalam konteks politik desa mereka.

- c. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Sosialisasi ini mendorong transparansi dalam pengelolaan dana kampanye dan penggunaan uang dalam politik. Ini dapat membantu menciptakan sistem politik yang lebih akuntabel.
- d. **Meningkatkan Partisipasi Politik:** Warga desa yang mengerti money politik cenderung lebih aktif secara politik karena mereka merasa bahwa suara mereka lebih penting daripada uang.
- e. **Pemilihan yang Adil:** Sosialisasi ini membantu memastikan bahwa pemilihan desa berlangsung secara adil dan bahwa calon terpilih dipilih berdasarkan merit daripada uang.
- f. **Penguatan Demokrasi Lokal :** Desa yang teredukasi tentang money politik dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam memperkuat demokrasi lokal mereka.
- g. **Melindungi Kesejahteraan Desa :** Praktik money politik yang tidak etis dapat merugikan kesejahteraan desa dengan mengalokasikan sumber daya secara tidak adil. Sosialisasi ini dapat membantu melindungi kepentingan desa.
- h. **Pemahaman Terhadap Hak Pilih :** Warga desa yang teredukasi akan money politik lebih cenderung menghargai hak pilih mereka dan memastikan bahwa hak tersebut tidak disalahgunakan.

Sosialisasi atau penyuluhan tentang money politik di desa Maesan Wetan adalah langkah kunci dalam menjaga integritas demokrasi lokal, melindungi hak-hak warga desa, dan memastikan bahwa proses politik berjalan dengan cara yang adil dan transparan. Setelah melakukan sosialisasi Pemilu, dapat dilihat bahwa masyarakat maesan wetan sedikit memahami tentang Money Politic yang marak terjadi di negara ini. Oleh karena itu masyarakat maesan wetan menginisiasikan untuk berkomitmen menolak money politic

Simpulan

Sosialisasi, sebagai metode pendidikan publik, terbukti menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya pemilih pemula, tentang pentingnya partisipasi dalam sistem demokrasi dan bahaya money politik yang mengintai. Kegiatan ini menghasilkan temuan signifikan, pertama-tama mengidentifikasi bahwa pemahaman masyarakat, terutama pemilih pemula, tentang hak dan kewajiban mereka dalam pemilu sering kali terbatas. Banyak orang mungkin tidak menyadari peran aktif yang dapat mereka mainkan atau melihat partisipasi dalam pemilu sebagai tugas yang tidak relevan. Ini merupakan hambatan serius terhadap demokrasi yang sehat.

Selanjutnya, kegiatan ini membahas money politik dalam konteks pemilu sebagai ancaman serius terhadap integritas pemilihan dan perwakilan demokratis. Pemilih yang tidak memahami dampak buruk money politik mungkin rentan terhadap manipulasi politik yang merugikan. Namun, melalui metode sosialisasi yang efektif, kami berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam pemilu, serta bahaya money politik. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa upaya ini berhasil, target sosialisasi mengalami peningkatan pemahaman yang signifikan tentang peran dan tanggung jawab mereka dalam proses pemilu. Mereka juga lebih mampu mengidentifikasi tanda-tanda money politik dan memahami dampak negatifnya terhadap integritas pemilihan umum.

Kegiatan ini membuktikan bahwa meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilu, serta money politik, memiliki dampak positif pada tingkat partisipasi pemilih pemula. Masyarakat yang lebih teredukasi cenderung lebih aktif dalam berpartisipasi dalam pemilu, yang pada gilirannya dapat meningkatkan legitimasi dan representasi dalam sistem politik. Sosialisasi terbukti sebagai metode efektif dalam meningkatkan pemahaman pemilih pemula tentang hak dan kewajiban mereka dalam berpartisipasi dalam pemilu sambil mengatasi bahaya money politik. Ini merupakan langkah penting dalam memperkuat demokrasi dan memastikan pemilihan umum yang adil dan transparan.

Ucapan Terima Kasih

Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini, tim mengucapkan terima kasih atas bantuan, arahan, serta motivasi yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun pihak - pihak yang telah membantu dan membimbing kami dalam pelaksanaan kegiatan yaitu, Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat-Nya sehingga tim dapat melaksanakan seluruh kegiatan dengan lancar, pihak Universitas Muhammadiyah Yogyakarta selaku penyelenggara kegiatan pengabdian masyarakat, K.H Ngaliman selaku Lurah Wahyuharjo, Nita Zuni Astuti selaku Kepala Dukuh Maesan Wetan, Karang Taruna Maesan Wetan, Segenap Warga Maesan Wetan dan Teman-teman tim pengabdian masyarakat. Semoga kegiatan pengabdian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya bagi penulis sendiri.

Daftar Pustaka

- Jurdi, F, 2018, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Begovic, M. E. (2021). Money politik pada pemilihan di Indonesia. *Sol justicia*, vol.4 no.2, 105-122.
- Kulon Progo. Pem.D/71/820/D.4. Tentang (Pengangkatan Panewu Lendah Kulonprogo). Kulonprogo: Pemda
- Azmi Rizky Anisa, A. A. (2021). Pengaruh Kurangnya Literasi serta Kemampuan dalam Berpikir Kritis yang Masih Rendah dalam Pendidikan di Indonesia. *Current Research in Education: Conference Series Journal Vol. 01 No. 01*, 1-11.
- Poguntke, T., & Scharrow, S. E. (2016). *Parties, Social Organizations, and Civil Society: Institutional Approaches to Democratization*. Oxford University Press.
- Olasupo, D. M. (2015). The Impact of Political Socialization on 2015 General Election: *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 77-83.
- Moch Edward Trias Pahlevi, A. A. (2019). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6 (1), 141-152.
- Badan Pengawas Pemilu. (2019). 34 Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta mendeklarasikan diri sebagai Desa Anti-Politik Uang. Yogyakarta.
- Purnamasari. (29, Agustus 2019). Survei LIPI: Masyarakat Memandang Politik Uang Bagian dari Pemilu, Tidak Dilarang, Jakarta: Kompas.com.
- Komite Independen Sadar Pemilu. (2019). *Pemilih Milenial dan Kontestasi Politik Elektoral (Evaluasi dan Hasil Penelitian Komite Independen Sadar Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019)*. Rua Aksara. Yogyakarta
- Aspinall, E., & Hicken, A. (2019). Guns for Hire and Enduring Machines: Clientelism Beyond Parties in Indonesia and the Philippines. *Journal Democratization* 27 (1): 137-156.
- Hodess, R. (2004). *Global Corruption Report 2004: Political Corruption*. https://www.transparency.org/whatwedo/publication/global_corruption_report_2004_political_corruption.
- Irawan, A., Dahlan, A., Fariz, D., & Putri, A. G. (2014). *Panduan Pemantau Korupsi Pemilu*. [https://antikorupsi.org/sites/default/files/Panduan Pemantauan Korupsi Pemilu.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/Panduan_Pemantauan_Korupsi_Pemilu.pdf)